

Januari-Maret 2024

L'PRADO

NEWS

VOL. 1



**KERJA KERAS
KERJA CERDAS
KERJA IKHLAS**

LPPMANADO.KEMENKUMHAM.GO.ID

DAFTAR

03

**SEKILAS TENTANG LPP
MANADO**

04

**APEL AWAL TAHUN
KEMENKUMHAM 2024**

05

**PENANDATANGANA
N KOMITMEN
BERSAMA,
PERJANJIAN KINERJA,
DAN PAKTA
INTEGRITAS TAHUN
2024**

06

**MAKLUMAT
PELAYANAN**

07

INDIKASI GEOGRAFIS

08

**KOMITMEN
PELAYANAN**

09

#TAUGA?

10

**PELANTIKAN PNS DAN
KASUBSI PELTATIB**

11

SURVEI LAYANAN

ISI

LPP MANADO



Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Manado merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara. LPP Manado berdiri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH- 10.OT.01.01 Tahun 2016 tanggal 15 Juli 2016.

LPP Manado beroperasi secara efektif sejak bulan Agustus 2017 dengan kapasitas 21 orang narapidana. Pada awal beroperasinya, LPP Manado menempati sebagian Bangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon yang beralamatkan di Jl. P. L. Kaunang, Kelurahan Kolongan Satu, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon. Adapun jumlah pegawai pada saat itu berjumlah 12 Orang yang dikepalai oleh Dra. Anggriani Hidayat serta terdiri dari 3 Orang Pejabat Eselon IV, 7 Orang Pejabat Eselon V dan 1 Orang JFU.

Bulan Februari 2018, LPP Manado mendapatkan penambahan 48 pegawai Penerimaan tahun 2017 sehingga jumlah pegawai menjadi 60 Orang. Sejak saat itu Pelaksanaan Tugas pada LPP Manado mulai berjalan optimal sehingga perubahan demi perubahan mulai terlihat baik administrasi maupun pelaksanaan teknis.

Pada bulan November 2018 terjadi pergantian Kepala Satker semula Dra. Anggriani Hidayat (Purna bhakti) kepada Tjahja Rediantana, Bc.I.P., S.H., M.H. (Plh) yang pada saat itu juga menjabat sebagai Kepala LPKA Tomohon. Selanjutnya pada Tahun 2019 LPP Manado mendapatkan Anggaran Belanja Modal untuk Pembangunan Gedung Kantor dan Rumah Dinas sebagaimana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Manado Nomor, SP DIPA-013.05.2.418344 Tahun Anggaran 2019 yang pembangunannya dimulai pada tanggal 20 September 2019 dan selesai pada Februari 2020 dengan Luas Bangunan 14.023 M2 serta Persemitaannya dilakukan secara Virtual oleh Yasonna H. Laoly Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 27 April 2020 bertepatan dengan Hari Bhakti Pemasarakatan.

Kemudian LPP Manado dikepalai oleh Gayatri R. Rilowati A.Md.I.P., S.H., M.Hum sejak 13 Januari 2020. Di bawah kepemimpinan Gayatri, LPP Manado mulai berproses dalam Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK-WBBM dan pada tanggal 12 Juni 2020 barulah dilakukan Pemindahan Operasional ke Gedung LPP Manado yang baru yakni berjarak sekitar 200 Meter dari LPKA Tomohon.

APEL AWAL TAHUN 2024 KEMENKUMHAM

Perkuat sinergi yang semakin pasti dan berakhlak untuk kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berdampak, Lapas Perempuan Manado mengikuti apel awal tahun 2024 serentak se-Indonesia bersama Menkumham Yasonna H Laoly secara virtual yang dilaksanakan secara terpusat di lapangan Kemenkumham, Jl. H.R. Rasuna Said Kav-67, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (5/1).



Dalam apel, ia juga menyampaikan 52 rencana aksi strategis yang diarahkan untuk mencapai visi "Terwujudnya Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat serta terbangunnya budaya kerja yang berorientasi pada kinerja organisasi yang berintegritas, efektif, dan efisien." terang Menkumham.



Tiga poin penting yang perlu menjadi perhatian bersama juga disoroti oleh Menkumham. Pertama, semangat PASTI BerAkhlak dalam menjalankan tugas dengan jujur dan integritas. Kedua, perkuat sinergi dan kolaborasi baik internal maupun eksternal untuk mengatasi setiap tantangan. Ketiga, Menteri mengajak pegawai generasi muda untuk terus berinovasi dan memberikan kontribusi maksimal demi kemajuan Kemenkumham.



PENANDATANGANAN KOMITMEN BERSAMA, PERJANJIAN KINERJA, DAN PAKTA INTEGRITAS TAHUN 2024

Lapas Perempuan Kelas IIB Manado menghadiri Penandatanganan Komitmen Bersama, Penandatanganan Perjanjian Kinerja serta Penandatanganan Pakta Integritas Tahun 2024.

Kegiatan diawali dengan penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2024 secara digital antara Kepala Kantor Wilayah dengan Para Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Para Kepala Divisi, penandatanganan Perjanjian Kinerja antara Kepala Kantor Wilayah dengan Para Kepala Divisi dilanjutkan dengan penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dan Pakta Integritas. Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan RKA-K/L di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Sulut.

Kakanwil menyampaikan Resolusi Kemenkumham Tahun 2024 yakni Perkuat Sinergi yang semakin PASTI dan berAKHLAK untuk Kinerja Kementerian Hukum dan HAM yang berdampak. "Jadilah ASN yang diperhitungkan, bukan hanya sekedar dihitung," pungkas Ronald.





LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB MANADO

MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini, kami Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Manado menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Layanan Bidang Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi;
2. Layanan Bidang Keamanan dan Ketertiban;
3. Layanan Bidang Kesehatan dan Perawatan Narapidana/Tahanan;
4. Layanan Bidang Tata Usaha;
5. Layanan Inovasi.

Apabila tidak menepati janji, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Tomohon, 24 Januari 2024
Plt. Kalapas



Ditandatangani secara elektronik oleh :

LIDYA AWOAH
NIP. 19810801 200212 2 005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSEK), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dengan nomor sertifikat instalasi adalah: <https://www.bssn.go.id/verifikasi>

INDIKASI GEOGRAFIS

Berdasarkan data di dgip.go.id, hingga tahun 2023 sudah ada 138 indikasi geografis Indonesia yang terdaftar di Ditjen Kekayaan Intelektual.

Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.



KOMITMEN PELAYANAN

SELURUH LAYANAN
DI LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB MANADO
TIDAK DIPUNGUT BIAYA

GRATIS

SEGERA LAPORKAN APABILA MENEMUI PEGAWAI LAPAS PEREMPUAN MANADO YANG MASIH MEMINTA DAN/ATAU MENERIMA BARANG/UANG/FASILITAS ATAU APAPUN DARI PENGUNJUNG MAUPUN WARGA BINAAN MELALUI KANAL WHISTLEBLOWING SYSTEM LAPAS PEREMPUAN MANADO DI BAWAH INI:



LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT

WWW.LAPOR.GO.ID
APLIKASI SP4N LAPOR



WHATSAPP
0852-8200-0026



THE BANGKOK RULES

Pada Tahun 2010 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi aturan mengenai hak perempuan dalam tahanan.

The Bangkok Rules memberikan sejumlah aturan bersama yang harus diberlakukan baik untuk perempuan yang normal maupun perempuan dengan kebutuhan khusus (perempuan hamil, perempuan dengan masalah narkoba dan perempuan disabilitas) di dalam tahanan.



#TauGa?

The United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non Women Offenders atau yang dikenal dengan The Bangkok Rules.

70

Bangkok Rules meliputi 70 aturan mengenai kebutuhan layanan kesehatan khusus gender bagi warga binaan perempuan yang merupakan pengejawantahan keprihatinan dan rekomendasi yang sebelumnya telah tercantum dalam Declaration on Women's Health in Prison. Melalui Bangkok Rules, hak khusus warga binaan perempuan dapat dipenuhi dengan baik, khususnya warga perempuan hamil, menyusui maupun membawa anak.

PELANTIKAN PNS DAN KASUBSI PELTATIB



Setelah cukup lama kosong akhirnya Jabatan Kepala Subseksi Pelaporan dan Tata Tertib pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Manado terisi oleh Mahdi Syamri yang resmi dilantik dan diambil sumpah/janji jabatan, Kamis (26/01) bertempat di Aula Mapalus, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara.

PUAS DENGAN PELAYANAN KAMI?

Bantu kami untuk terus memberikan pelayanan yang lebih baik dengan memberikan penilaian melalui Survei Kepuasan Masyarakat dan Persepsi Anti Korupsi.



**UNTUK PENGGUNA DAN PENERIMA LAYANAN
MOHON MENGISI SURVEI DENGAN MEMINDAI
QR CODE DIBAWAH INI**

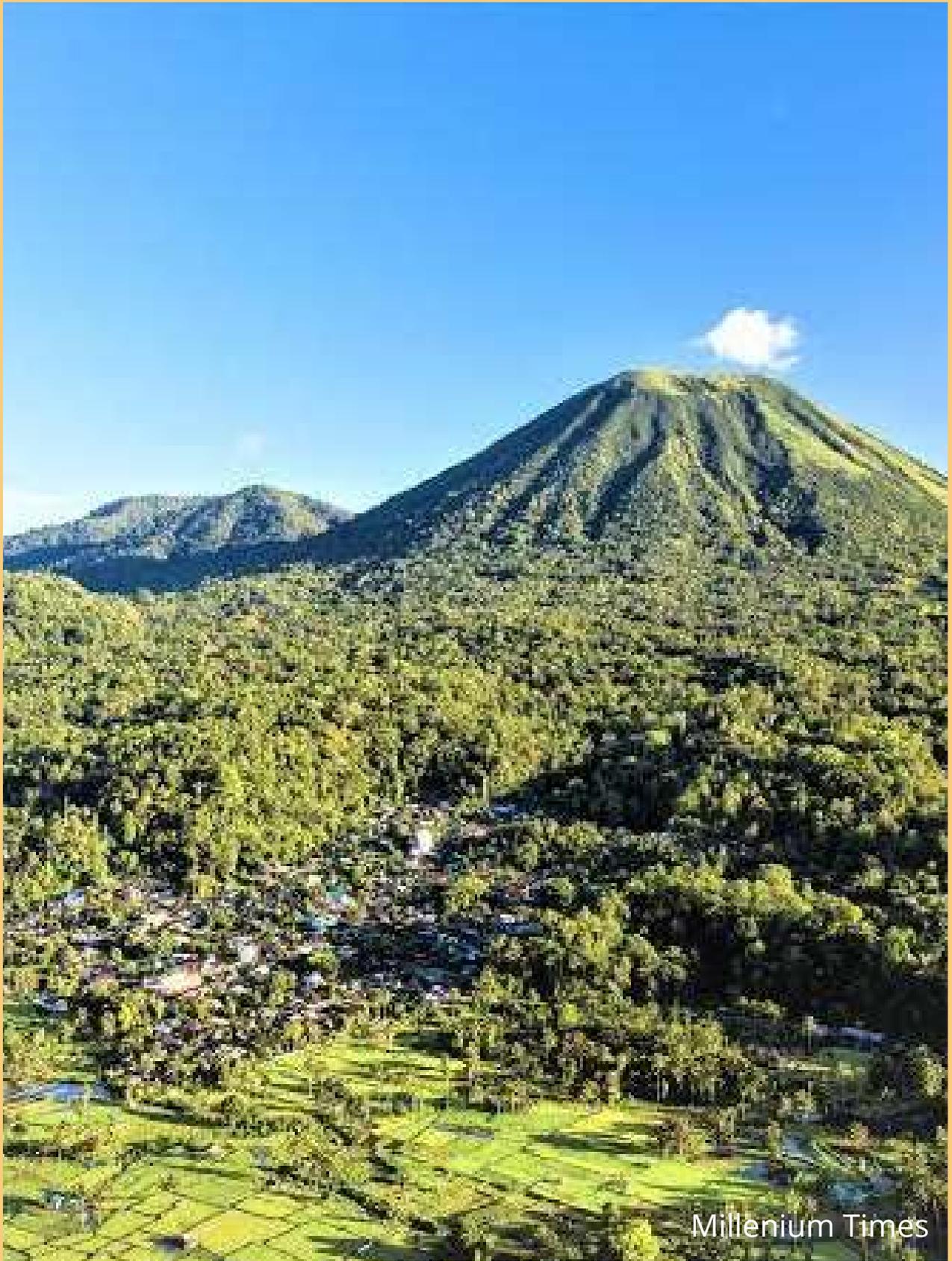
**SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK) DAN
SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SPKP)**

Lembaga Pemasarakatan PEREMPUAN KLAS IIB MANADO



Survei Dilaksanakan Oleh:
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA





GUNUNG
LOKON

